

## DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Teknis Nomor 22 tentang *Akuntansi Utang Berbasis Akrual*
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2015). *Pokok-Pokok Proses Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2019). *Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Revisi Ke-2 Tahun 2019*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2020). *Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2020 Revisi II*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (2022). Retrieved from Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan: <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. 2021. *Laporan Keuangan BA 999.01 Pengelolaan Utang Tahun Anggaran 2020 (Audited)*. Republik Indonesia: DJPPR Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN KiTa Edisi Januari 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN KiTa Edisi Mei 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN KiTa Edisi Januari 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor KEP-34/PR/2017 Tentang *Peta Proses Bisnis DJPPR*.
- Musyaffa, I. (2020). *Ekonomi: Anadolu Agency*. Dipetik Desember 1, 2021, dari Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/kemenkeu-apbn-2020-dua-kali-berubah-karena-covid-19/1864540#>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.05/2016 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.05/2017 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Utang Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang *Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang *Akuntansi Kewajiban*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang *Surat Utang Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara*.